BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkembangan teknologi digital telah mencapai kemajuan yang signifikan dan telah menyentuh berbagai bidang, termasuk sektor keuangan pemerintah. Teknologi digital, seperti Banyak implementasi sistem informasi keuangan daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan di berbagai negara. Berbagai aspek kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh era digital termasuk pengelolaan keuangan daerah Kota Parepare, sebagai Salah satu kota di Indonesia dipengaruhi oleh hal ini. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, tantangan dan peluang baru muncul dalam upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Failany & Fahriani, 2024). Perkembangan teknologi yang semakin pesat berpengaruh pada banyak aspek, salah satunya adalah aspek ekonomi dan juga bisnis. Persaingan antar usaha menjadi semakin ketat. semakin berkembangnya suatu usaha agar dapat bersaing dalam pasar sebuah usaha dituntut untuk meningkatkan kualitas kerja, mutu pelayanan dan ketepatan data. Selain itu suatu usaha harus memiliki informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Untuk mendapatkan informasi yang demikian, dibutuhkan sistem informasi yang baik dan

tepat. Karena sistem informasi yang baik saja tidak cukup, sistem tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tersebut (fatimah Rappang, n.d.)

Perkembangan teknologi digital telah mencapai kemajuan yang cepat dan telah menyentuh berbagai bidang, termasuk sektor keuangan pemerintahan. Teknologi digital, seperti sistem informasi manajemen keuangan, telah banyak diterapkan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan di berbagai negara. Transparansi keuangan adalah salah satu elemen penting dari gagasan pemerintahan yang baik yang mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Melalui transparansi keuangan, masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana publik secara langsung, sehingga pemerintah dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan keuangan yang diambil.

Teknologi digital adalah alat yang mengurangi beban kerja manual manusia, berfokus pada sistem operasi otomatis yang menggunakan komputer atau format yang dibaca oleh komputer. Sementara itu, teknologi komunikasi digital didasarkan pada sistem komputer elektronik yang dapat memproses data dan memanfaatkan sistem perbankan. Bilangan biner menghasilkan kode digital (1 dan 0) yang bergantung pada keberadaan listrik atau arus non-transistor yang tidak dapat diputus. (Vidyasari & Suryono, 2021)

Teknologi juga telah menjadi pola dan model transaksi dalam bisnis dan investasi Munculnya mata uang digital, atau "Uang Digital," telah membuat transaksi lebih cepat, lebih sederhana, lebih efisien, dan efektif. Manfaat penggunaan teknologi digital telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, tujuan studi untuk menganalisis nilai tambah dan keuntungan yang ditawarkan oleh teknologi digital tersebut. Di satu sisi, teknologi digital menawarkan potensi besar untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi manajemen keuangan daerah. Sistem informasi berbasis digital dapat mempermudah proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan. Hal ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mempercepat proses pengambilan keputusan, meminimalisir kesalahan, dan meningkatkan akurasi data Selain itu penggunaan teknologi digital juga membawa tantangan. Keamanan data dan sistem informasi menjadi isu krusial yang perlu diatasi. Peningkatan literasi digital di kalangan aparatur pemerintah dan masyarakat juga menjadi faktor penting untuk memastikan efektivitas penggunaan teknologi (Muhammad, 2019).

Menurut Pasal 391 UU 23 Tahun 2014, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, atau SIPD, diwajibkan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan data daerah dalam sistem informasi tertentu. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang mengatur Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) hal ini berdampak pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan oleh pemerintah daerah mulai menerapkan SIPD yang dirancang untuk lebih fleksibel, responsif, inovatif, dan akuntabel. Dengan memanfaatkan pendapat auditor yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, kualitas laporan keuangan daerah dievaluasi menggunakan proksi (Oki et al., 2020). Ini didasarkan pada gagasan Laporan auditor independen dapat berfungsi sebagai indikator konseptual mengenai kondisi audit keuangan, karena merangkum laporan keuangan yang telah diaudit dan memberikan informasi yang lebih akurat, menyeluruh, dan jujur.

Transparansi keuangan adalah salah satu elemen penting dari gagasan pemerintahan yang baik mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Melalui transparansi keuangan, masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana publik secara langsung, sehingga pemerintah dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan keuangan yang diambil (Alamsyah, 2022)

Prinsip transparansi adalah Untuk memastikan bahwa setiap orang dapat mengakses informasi mengenai kegiatan pemerintah. Informasi yang dapat diakses oleh publik berasal mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Laporan dibuat. berdasarkan informasi dari prinsip-prinsip dasar. Mereka yang membutuhkan dapat mendapatkan informasi tentang kebutuhan

masyarakat dengan cara yang bijaksana. berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Informasi Publik Tahun 2008. Menurut peraturan tersebut, transparansi, yang juga dikenal sebagai keterbukaan, adalah prinsip yang dapat memastikan bahwa masyarakat umum dapat dengan mudah mengakses informasi.

Misalnya, laporan tentang keuangan pemerintah yang menyajikan opini luas tanpa revisi (laporan auditor yang tidak diubah) akan meningkatkan kepercayaan para pembuat undang-undang, legislator, dan entitas pemerintahan lainnya. Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara adalah salah satu jenis pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan . Hal ini disampaikan melalui laporan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Laporan keuangan pemerintah harus disampaikan secara tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Selain itu, fenomena globalisasi, yang meningkatkan persaingan antara setiap negara, juga meningkatkan persaingan di setiap wilayah. Pemerintahan, di mana diharapkan daya saing ini dapat dicapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah. Mengacu pada undang-undang No. 22/1999 dan No. 25/1999, yang melengkapi UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 33/2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Ketika dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas dan Penggunaan berbasis akuntansi akrual dapat meningkatkan transparansi keuangan pemerintah dan dapat diamati dalam hal transparansi dan integritas. Ini karena, di bawah akuntansi berbasis akrual semua biaya yang timbul, dicatat dan diakui pembayaran yang telah dibayar (Vidyasari & Suryono, 2021). Dengan cara ini, akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan biaya layanan publik yang lebih terbuka.

Penyusunan laporan kinerja (LKJ) terdiri dari dua undang-undang utama: Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang keuangan pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2019 menetapkan petunjuk teknis untuk perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan prosedur peninjauan laporan kinerja instansi pemerintah, yang dalam situasi lain, akuntansi berbasis akrual juga dapat meningkatkan kinerja kerja. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ini dapat memberikan data tentang bagaimana sumber daya ekonomi digunakan. jelas dan juga menghitung kewajiban di masa depan (KSAP, 2006). Melihat potensi dan tantangan yang ada, penggunaan teknologi digital dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah Kota

Parepare menjadi topik yang relevan dan penting untuk dikaji (Muhammad, 2019). Pengembangan sistem informasi keuangan yang terintegrasi, peningkatan keamanan data, dan peningkatan literasi digital menjadi langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan.

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan publik menjadi isu penting dalam pemerintahan daerah (Oki et al., 2020). Sebagai salah satu wilayah yang menerapkan teknologi digital dalam pengelolaan keuangannya, berpotensi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, efektivitas penerapan teknologi ini perlu diteliti lebih lanjut. Namun demikian, pemerintah seringkali menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan secara transparan tanpa dukungan teknologi yang memadai.

Tantangan ini mencakup proses administrasi yang panjang, sulitnya melakukan pelacakan alur dana secara manual, serta keterbatasan dalam memberikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Selain itu, sistem manual juga memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya kesalahan manusia dan penyalahgunaan, yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Melalui latar belakang Penelitian ini akan berbicara lebih lanjut tentang penggunaan teknologi digital dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah Kota Parepare. Analisis tentang potensi, tantangan, dan strategi yang diperlukan akan dibahas secara mendalam. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan

dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah (Kushartiningsih & Riharjo, 2021).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tentang penerapan teknologi digital dalam meningkatkan transparansi keuangan pemerintah, namun masih minim kajian empiris yang secara spesifik menilai seberapa jauh teknologi ini mempengaruhi transparansi keuangan, khususnya di sektor publik Indonesia. Research gap ini menjadi landasan bagi Penelitian ini, yang bertujuan untuk menjelaskan cara-cara aplikasi teknologi digital dalam manajemen keuangan pemerintah dan menilai dampak penerapannya terhadap transparansi keuangan.

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memperluas pemahaman tentang efektivitas teknologi digital sebagai alat bantu transparansi keuangan dan manajemen publik, yang lebih akurat dan dapat di dipertangjawabkan

B. Fokus penelitian

Pada penelitian ini, analisis tentang penerapan teknologi digital dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada pembuatan lkpd. Apakah penerapan penggunaan teknologi digital dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh bagi pembuatan laporan keuangan daerah di kota pare pare?

C. Tujuan penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memiliki keuntungan dan efek positif pada sistem yang digunakan dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan daerah Kota Parepare. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah. daerah saat mereka membuat kebijakan dan strategi berbasis teknologi untuk meningkatkan tata kelola keuangan .

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis
    a. Pengembanga Akuntabilitas

        Penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang teori akuntabilitas dengan menunjukkan bagaimana teknologi digital mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban publik.

    b. KontribusiterhadapTransparansi

        Menawarkan wawasan baru tentang mekanisme transparansi melalui platform digital, sehingga membantu memahami peran teknologi dalam meningkatkan transparansi informasi publik.

2. Manfaat Praktis
    a. Peningkatan Transparansi Laporan Keuangan Memungkinkan masyarakat untuk mengakses laporan keuangan secara real-

time, sehingga mendorong keterbukaan dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

b. Akuntabilitas yang Lebih Baik Memfasilitasi mekanisme pelaporan yang lebih efisien dan akurat, memungkinkan pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara lebih baik.
c. Partisipasi Publik yang Meningkat Teknologi digital dapat menyediakan saluran untuk memberikan rekomendasi kepada masyarakat dan menjaga pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Teknologi Digital

Teknologi digital merupakan alat yang signifikan dalam mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia, tetapi lebih sesuai untuk sistem otomatis yang memanfaatkan komputer atau format yang dapat dibaca oleh perangkat komputer. Di sisi lain, teknologi komunikasi digital berlandaskan pada sistem komputer elektronik, yang mampu memproses data dan menggunakan sistem perbankan. Sistem bilangan biner akan menghasilkan kode digital (1 dan 0**)** tergantung pada apakah ada listrik atau keadaan non-transistor-terdegradasi) (Muhammad, 2019).

Setiap alat diuji dan digunakan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam setiap tugas yang dilakukan; berbagai uji coba dilakukan untuk mencapai tingkat efisiensi yang signifikan dengan risiko yang sekecil mungkin. Perkembangan dimulai dengan proses perbaikan diri dalam kehidupan sehari-hari dan berakhir dengan tingkat kesadaran diri sebagai individu dan makhluk sosial. Dari awal hingga akhir, kemajuan teknologi telah dibuat, dimulai dari era pertanian, industri, informasi, dan komunikasi serta informasi. (Nugroho et al., 2024)

Teori Sistem Informasi menyatakan bahwa sistem informasi yang efektif dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data dan informasi. Dalam konteks keuangan daerah, sistem informasi manajemen keuangan dapat mempercepat proses pelaporan dan meningkatkan akurasi data (Failany & Fahriani, 2024). Teknologi ini juga mendukung pencapaian yang lebih baik dalam manajemen sumber daya karena proses pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data dapat dilakukan secara otomatis (Wiyana et al., 2023).

1. SiKD, atau Sistem Informasi Keuangan Daerah

   Menurut PP No. 56 tahun 2005 pasal 1 angka 15, sistem informasi keuangan daerah (SIKD) adalah sistem yang dirancang untuk mendokumentasikan, mengelola, dan mengatur data terkait keuangan daerah serta informasi lainnya yang dibagikan kepada masyarakat. SIKD juga berfungsi sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

2. SIPKD, atau Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

   Menurut PP No. 56 tahun 2005, pasal 13 huruf a menyatakan bahwa “Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah” mencakup serangkaian tindakan dan prosedur yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hubungannya dengan rangka anggaran pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan

daerah komponen atau subsistem dari SIKD. Definisi SIPKD dalam konteks SIKD dapat dijelaskan sebagai cara untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi ekonomi daerah. Dua pengertian yang berbeda dari segi fungsi keduanya memberikan informasi tentang keuangan daerah nanum pemerintah kota parepare lebih cenderung menggunakan SIPKD dan dijalankan sesuai aturan yang berlaku merekam menyampaikan bahwa kami melaksanakan tugas dalam melaporkan atau mencatatkan belanja pemerintah daerah itu berlandaskan aturan maka dalam penggunaan aplikasi sipd RI ini tidak serta merta kami gunakan saja (“Flypaper Effect,” 2013).

Sistem informasi Lembaga, seperti yang dijelaskan, adalah sistem informasi yang terkait dengan mata uang nasional. Sistem informasi di tingkat daerah pemerintah dikenal sebagai sistem informasi keuangan daerah. Peraturan Menteri Keuangan memberikan informasi tentang sistem informasi keuangan negara yang terintegrasi . Berdasarkan informasi ini, dapat disimpulkan bahwa SIKD adalah bagian dari sistem informasi keuangan nasional (Perda Persampahan No. 2/2017, 2017). Tujuan sistem informasi daerah: Pemerintah sedang menerapkan sistem informasi daerah secara nasional dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan kebijakan nasional dan pengendalian fiscal Memberikan informasi tentang ekonomi Daerah secara

nasional, termasuk Daerah Pinjaman, Dana Perimbangan, dan defisit anggaran pengendalian.

2. Melakukan observasi, analisis, dan penilaian terhadap Desentralisasi, dekonsentrasi, tanggung jawab bantuan, pinjaman daerah, dan anggaran daerah yang tidak mencukupi

1) Ketersediaan Infrastruktur Teknologi

Adanya sistem jaringan yang mendukung komunikasi dan pengolahan data secara digital (misalnya, broadband internet, pusat data). merujuk pada sejauh mana suatu organisasi, pemerintah, atau masyarakat memiliki dan dapat mengakses sistem informasi, dan sumber daya digital lainnya yang diperlukan untuk mendukung penggunaan teknologi dalam operasional sehari-hari. Infrastruktur ini mencakup semua elemen yang diperlukan agar teknologi dapat berfungsi secara optimal, serta memberikan dukungan terhadap berbagai aktivitas digital, baik untuk individu, perusahaan, maupun sektor publik (JASMINE, 2014).

2) Implementasi Sistem Informasi

Penggunaan sistem manajemen informasi berbasis digital untuk operasional, seperti aplikasi bisnis digital. merujuk pada proses penerapan dan pengintegrasian sistem informasi dalam suatu organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempermudah komunikasi

serta manajemen data. Sistem informasi itu sendiri adalah kombinasi dari prosedur, dan sumber daya manusia mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan data yang diperlukan perusahaan (Yanti et al., 2020)

3) Kemampuan Digital Sumber Daya Manusia (SDM)

Tingkat keterampilan karyawan dalam menggunakan teknologi digital dan perangkat lunak. merujuk pada tingkat keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. dalam menggunakan teknologi digital untuk mendukung tugas dan tanggung jawab mereka di lingkungan kerja. Kemampuan digital SDM ini sangat penting di era digital, di mana hampir semua sektor dan kegiatan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing (Muhammad, 2019).

Teori Digitalisasi Menjelaskan proses transformasi dari sistem tradisional ke sistem digital. Digitalisasi memungkinkan otomatisasi proses, pengurangan biaya, dan peningkatan aksesibilitas informasi, yang berdampak positif pada akuntabilitas dan transparansi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi, data, dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan mendistribusikan informasi. Dalam konteks keuangan daerah, sistem informasi yang baik dapat meningkatkan

akuntabilitas dengan menyediakan data yang akurat dan tepat waktu (Muhammad Afif Failany, 2024).

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik mengacu pada kewajiban pihak yang memegang amanah (agen) untuk menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua tindakan serta bertanggung jawab atas semua tindakan tersebut. Pemberi amanah, atau prinsipal, memiliki hak dan wewenang untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut. Selain itu, akuntabilitas juga mencakup kewajiban untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban kepada pihak yang berhak atas tindakan dan kinerja badan hukum, pimpinan, atau organisasi. Pihak yang berhak juga memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang berhak (Kushartiningsih & Riharjo, 2021) . Pertanggung jawaban dalam bidang keuangan merupakan hal paling krusial pada setiap pengelolaan anggaran baik pada Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta, sebab Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan juga merupakan tolok ukur terhadap tingkat keberhasilan dari sebuah entitas (The et al., arham 2024)

Pengertian Akuntabilitas jika dipersepsikan dari sisi keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas

keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah) (Dewi Mantasari et al., 2023).Teori Akuntabilitas Publik Menekankan kewajiban pejabat publik untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada masyarakat. Akuntabilitas ini mencakup transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan akuntabilitas mengacu pada pertanggungjawaban kepada publik atas setiap tindakan yang diambil. Akuntabilitas juga berarti ada batasan dan siapa yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan seseorang, badan hukum, atau pemimpin organisasi. Salah satu definisi lain dari akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan penjelasan atau menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, atau pemimpin organisasi, kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

1) Melaporkan Keuangan yang Transparan

Adanya laporan keuangan yang jelas dan dapat dipahami oleh publik, mencakup sumber dana, penggunaan anggaran, dan pertanggungjawaban penggunaan dana. merujuk pada praktik penyajian informasi keuangan dengan cara yang jelas, jujur, dan

dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Ini mencakup penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu, akurat, dan menyeluruh, sehingga para pemangku kepentingan seperti investor, karyawan, dan masyarakat umum dapat menilai kesehatan keuangan suatu organisasi (Syachbrani et al., 2024).

2) Prosedur dalam Pengambilan Keputusan

Diperlukan kejelasan mengenai siapa yang memiliki tanggung jawab. dalam setiap pengambilan keputusan serta prosedur yang diikuti. Agar dalam suatu instansi dapat mengeluarkan keputusan yang bijak Prosedur dalam pengambilan keputusan adalah rangkaian langkah yang dilakukan untuk membuat keputusan yang informasional, logis, dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses ini melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan informasi, penentuan alternatif, evaluasi, pemilihan alternatif terbaik, implementasi, serta pemantauan dan evaluasi hasilnya (Kurniawati, 2017). Keputusan yang baik dapat mendukung keberhasilan organisasi atau individu dalam mencapai tujuan dan mengatasi tantangan yang ada.

3) Tanggung Jawab Pimpinan

Pemimpin organisasi atau pemerintah memiliki kebijakan jelas siapa yang bertanggung jawab setiap kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan. Tanggung jawab pemimpin sangat luas dan mencakup banyak aspek dalam kehidupan organisasi atau

masyarakat. Pemimpin tidak hanya diharapkan untuk membuat keputusan yang strategis, tetapi juga untuk menginspirasi, membimbing, dan memastikan kesejahteraan tim atau anggota yang dipimpinnya (Syachbrani et al., 2024). Dengan tanggung jawab yang besar, seorang pemimpin harus memiliki keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan pengelolaan sumber daya yang baik. Tanggung jawab ini tidak hanya berkaitan dengan pencapaian tujuan, tetapi juga dengan pengelolaan sumber daya manusia dan membangun tempat kerja yang produktif dan sehat (Aprilia et al., 2024). Akuntabilitas berarti bahwa pemilik dan pemangku kepentingan organisasi, serta para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta, dan organisasi masyarakat, merasa bertanggung jawab. Akuntabilitas dalam birokrasi termasuk memastikan transparansi dalam pengadaan, akuntansi, keuangan, dan pengelolaan sumber daya serta mengatasi inefisiensi dan penyalahgunaan sumber daya.

3. Transparansi

Teori Akuntabilitas Teori ini menekankan bahwa transparansi meningkatkan akuntabilitas (Ngakil & Kaukab, 2020) Ketika informasi tersedia untuk publik, individu atau institusi yang memiliki kekuasaan diharapkan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Transparansi menunjuk pada kebebasan memperoleh informasi (Sugiharti & Hariani, 2021). Mentransparankan dan

menyusun memerlukan beberapa pertimbangan. Transparansi, menurut Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dan Departemen Dalam Negeri, adalah prinsip yang memastikan bahwa setiap orang memiliki akses atau kebebasan untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah. Informasi ini termasuk informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil dari proses tersebut.

1) Keterbukaan Anggaran

Keterbukaan anggaran mengacu pada sejauh mana informasi terkait anggaran suatu pemerintah daerah atau organisasi publik disajikan secara jelas, terbuka, dan mudah diakses oleh publik. Keterbukaan anggaran adalah salah satu dasar utama yang mendasari tata kelola pemerintahan yang efektif, di mana pengelolaan sumber daya publik (termasuk anggaran) harus dilakukan dengan transparansi agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (Albugis Ratulangi Manado, 2016)

2) Keterlibatan Masyarakat

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah atau pemerintahan merujuk pada proses di mana masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan, program, atau anggaran yang berhubungan dengan kepentingan publik (Syachbrani et al.,

2024). Keterlibatan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil, termasuk yang berhubungan dengan anggaran, benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih baik.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan pemerintahan adalah elemen penting dalam akuntabilitas dan transparansi. Dengan melibatkan masyarakat, proses pengambilan keputusan menjadi lebih terbuka, lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, dan lebih mudah diawasi.keterlibatan yang maksud pemerintah mampu memberikan ruang untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya sehingga dapat di pertimbangkan oleh pemerintah kota parepare

Tiga elemen utama transparansi adalah sebagai berikut: (1) informasi yang dapat diakses, atau informasi yang dapat diakses; (2) menjelaskan peran dan tanggung jawab lembaga yang terlibat dalam proses yang membutuhkan transparansi; dan (3) sistem dan kapasitas yang mendukung produksi, serta jaminan informasi yang diselenggarakan. Komponen ketiga ini sangat berhubungan satu sama lain (Kushartiningsih & Riharjo, 2021).

T**eori Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pemerintahan (E-Government)** E-Government mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pelayanan publik, termasuk dalam hal akuntabilitas dan transparansi. Penggunaan sistem digital dalam pengelolaan keuangan daerah membantu meminimalkan manipulasi data dan mempercepat proses pelaporan serta audit keuangan. Teknologi ini memungkinkan pelaporan yang lebih cepat dan akurat, serta dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

B. Penelitian terdahulu

Hasil penelitian yang ditulis Muhammad Afif Failany,Dian Fahriani pada tahun (2024) yakni Penggunaan Teknologi Digital untuk Meningkatkan Transparansi Keuangan Pemerintah .Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital mempercepat integrasi data, mempermudah akses laporan keuangan, dan mendukung pelacakan dana secara real-time. Namun, tantangan teknis dan sumber daya manusia masih menjadi kendala. Namun demikian bahwa teknologi digital mempercepat integrasi data, mempermudah akses laporan keuangan, dan mendukung pelacakan dana secara real-time. Namun, tantangan teknis dan sumber daya manusia masih menjadi kendala. Penelitian ini berkontribusi dengan memberikan pemahaman

mengenai pentingnya infrastruktur teknologi dan pengembangan SDM untuk meningkatkan efektivitas sistem keuangan digital pemerintah.

Wanda Aprilla, Mardalena Wulandari, Arie Elcaputera (2024) Dengan judul Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah melalui Penggunaan Teknologi Digital dan Keterlibatan Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi teknologi digital dan partisipasi publik memiliki potensi besar untuk mewujudkan sistem politik yang lebih transparan dan akuntabel. Saran yang diberikan meliputi pengembangan infrastruktur teknologi yang lebih baik, peningkatan literasi digital masyarakat, dan promosi partisipasi publik dalam proses pengawasan.

Tujuan dari aplikasi sistem akuntansi keuangan daerah, yang ditulis oleh Febriana F. Albugis pada tahun 2016, adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sejak Pemerintah Provinsi Sulut memulai penyusunan Neraca Awal, sistem dan prosedur keuangan telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara berharap dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan dengan

menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sejak Pemerintah Provinsi Sulut memulai penyusunan Neraca Awal, sistem dan prosedur keuangan telah sesuai dengan peraturan yang ada.

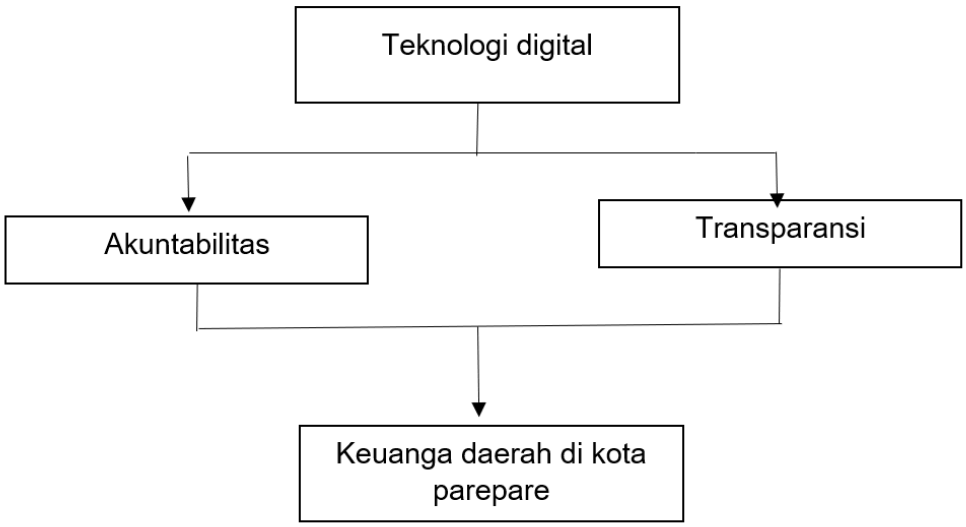
Salmi Universitas Muhammadiyah Parepare Dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, hasil Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian, Pemerintah Desa Bakaru bertanggung jawab atas pengelolaan dana Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang melibatkan partisipasi masyarakat dari tahap perencanaan hingga pembangunan. Menurut temuan penelitian tentang transparansi pengelolaan dana desa dalam pembangunan di desa yang dilakukan di Desa Bakaru Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya musrembang untuk mengakui ide-ide warga, adanya partisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan, dan adanya baliho transparansi yang dipasang di Kantor Desa.

Adhi Nugroho, Fadhilah Dian Kusumawati, Willa Putri Malinda Buchori pada tahun (2024). Dengan judul peran digitalisasi akuntansi dalam efisiensi dan transparansi Menurut hasil penelitian, digitalisasi akuntansi telah meningkatkan efisiensi dan transparansi. Digitalisasi akuntansi berfokus pada otomatisasi rutinitas seperti pencatatan transaksi dan pembuatan laporan keuangan. Ini

menghasilkan lebih banyak efisiensi dan transparansi dalam operasi. Digitalisasi akuntansi juga memungkinkan akses instan ke data keuangan, meningkatkan produktivitas dan transparansi perusahaan. Karena digitalisasi berjalan sangat cepat, pelaku kecurangan tidak akan bisa melakukannya.

C. Kerangka pikir

Gambar 2. 1 kerangka pikir



Kerangka di atas menjelaskan tentang

A. Teknologi Digital Mencakup aplikasi, sistem informasi, dan platform online yang digunakan dalam pengelolaan keuangan.

B. Akuntabilitas Tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan kepada publik.
C. Transparansi Keterbukaan informasi terkait kebijakan, proses, dan laporan keuangan kepada masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif kasus untuk menganalisis implementasi teknologi digital untuk membantu transparansi keuangan pemerintah daerah Kota Parepare.Penelitian ini berfokus pada pengamatan langsung dan analisis mendalam terhadap proses pengelolaan keuangan dengan teknologi digital pada pengelolaan keuangan daerah Kota parepare, yang menjadi populasi dan sampel Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. penerapan teknologi digital dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah di Kota Parepare (Munawar et al., 2021).

Data dikumpulkan melalui wawancara dan survei di tempat terkait mendalam dengan stakeholders terkait, termasuk pejabat pemerintah daerah, pengawai kesekretariatan keuangan daerah , dan masyarakat. Observasi langsung terhadap implementasi sistem teknologi informasi keuangan juga dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik yang ada.

Analisis juga dokumen seperti laporan keuangan dan kebijakan terkait, digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh. Metode triangulasi, yang membandingkan data dari berbagai sumber, digunakan untuk memastikan keabsahan dan kevalidan

hasil penelitian yang dihasilkan dengan menggabungkan informasi dari berbagai sumber, metode, dan kerangka teori. Dengan demikian Peneliti dapat memeriksa kesesuaian hasil dari berbagai sudut pandang, mengurangi potensi bias, dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian bahwa data itu valid. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan saran yang bermanfaat untuk memperbaiki sistem keuangan daerah dan membantu mengembangkan kebijakan publik yang lebih jelas dan adil.

B. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian dilakukan pada badan keuangan daerah di kota parepare bidang akuntansi dan pelaporan Penelitian berlangsung dari November hingga desember 2024.

C. Informan

Informan adalah individu yang memberikan informasi mengenai situasi, kondisi, atau latar belakang penelitian. Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penelitian ini disebut informan. pengolahan Badan keuangan daerah khususnya bidang akuntansi dan pelaporan dan beberapa staf

D. Definisi operasional variabel

Operasional variabel adalah definisi dari sekumpulan variabel yang telah ditetapkan sejak awal. Ini dianggap perlu untuk memastikan bahwa variabel yang mungkin memiliki dua makna memiliki kesamaan makna. Dalam penelitian ini, penulis

menggunakan berbagai variabel yang dapat didefinisikan secara operasional dan memberikan arahan untuk penelitian ini.

E. Jenis Dan Sumber Data

1) Jenis data

Data kualitatif digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari informasi deskriptif non-angka, seperti gambaran umum mengenai perusahaan, struktur organisasinya, visi dan misi, serta data lain yang dibutuhkan oleh penulis untuk penelitian ini. Data kuantitatif terdiri dari data angka atau bilangan yang nilainya tidak stabil atau tidak berubah variative.

2) Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan tertentu dari penelitian yang sedang berlangsung. Untuk penelitian tentang teknologi digital dalam keuangan daerah, data primer dapat mencakup kebijakan yang ada dan hasil evaluasi penerapan teknologi dalam pengelolaan keuangan.

b. Data sekunder

Pengumpulan dokumen sekunder dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data

ini,penelitian dapat menghasilkan temuan yang komprehensif dan mendalam mengenai dampak teknologi digital dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.

F. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data ini dilakukan di Badan Keuangan Daerah pada bidang akuntansi dan pelaporan Kota Parepare Pengumpulan data dari sumber ini dilakukan dengan cara.

a. Observasi

Ketika penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, atau fenomena alam, observasi digunakan. Ini juga dilakukan ketika jumlah responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2014: 203). Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap semua tindakan yang terkait dengan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan di daerah kota Parepare.

b. Wawancara

Selama wawancara, responden ditanyai secara langsung terkait apa saja permasalahan dalam penggunaan teknologi digital dalam peningkatan transparansi keuangan daerah yang terjadi selama periode tertentu di Badan keuangan daerah kota parepare.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan dokumen penelitian yang diperlukan adalah metode pengumpulan data yang disertai dengan petunjuk. Penggunaan teknologi digital dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah kota parepare.

G. Teknik Analisis Data

Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. mendalam, survei, dan analisis dokumen menggunakan pendekatan studi kasus deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data kualitatif pengelolaan dan pegaplikasian pada penggunaan teknologi serta hasil wawancara. Data utama untuk penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara langsung dengan subjek yaitu pimpinan dan staf badan keuangan daerah bidang akuntansi dan pelaporan. Agar penerapan teknologi digital dapat berjalan dengan lebih efektif, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur teknologi yang mendukung sistem keuangan digital. Dengan demikian, kemampuan pegawai dalam memanfaatkan teknologi dapat ditingkatkan, dan hambatan teknis dalam penerapan sistem digital dapat diatasi. Implementasi yang menyeluruh dan pengawasan yang kuat akan memastikan sistem keuangan digital berjalan secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah objek penelitian

Pada zaman Hindia Belanda, Wali Kota Parepare adalah *Kontroler atau Gezag Hebber dan Asisten Residen*. Terdiri dari wilayah pemerintahan *Onder Afdeling Barru, Onder Afdeling Sidenreng Rappang, Onder Afdeling Enrekang, Onder Afdeling Pinrang, dan Onder Afdeling* Parepare yang disebut sebagai *"Afdeling* Parepare" masing-masing diawasi oleh *Kontroler atau Gezaghebber*. Selain pemerintah Hindia Belanda, kerajaan Bugis juga memiliki pemerintahan, seperti *Arung Barru di Barru, Arung Enrekang di Enrekang, Addatuang Sidenreng di Sidenreng Rappang, dan Addatuang Sawitto di Pinrang*. Di Parepare juga ada *Arung Mallusetasi*.

Struktur pemerintahan ini bertahan hingga Perang Dunia Kedua, yang dimulai ketika Pemerintah Hindia Belanda runtuh sekitar tahun 1942. Komite Nasional Indonesia, yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, mengubah pemerintahan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1948 mengubah struktur pemerintahan, dengan hanya ada Kepala Daerah atau

Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) di tingkat daerah dan jabatan seperti Asisten Residen atau Ken Kanrikan dihapus.

Pada saat itu, Parepare tetap menjadi Divisi dengan wilayah yang mencakup lima wilayah tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, *Onder Afdeling* keempat dibentuk menjadi Kabupaten Tingkat II dengan nama Barru, Sidenreng Rappang, Enrekang, dan Pinrang. Setelah ditetapkan sebagai Kota Praja Tingkat II pada tahun 1963, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 sepuluh mengubah Parepare menjadi "*Kotamadya*". Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 3 Tahun 1970, tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah Wali Kota Parepare ditetapkan sebagai tanggal kelahiran *Kotamadya* Parepare.

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah menetapkan bahwa Badan Keuangan Daerah Kota Parepare berfungsi sebagai unsur pengawal dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Kepala Badan Keuangan Daerah bertanggung jawab membantu Walikota .

Visi dan misi Kota Parepare harus dipenuhi oleh Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Ini juga harus sesuai dengan platform politik pemerintah daerah, yang merupakan penjabaran

dari agenda yang diberikan kepada walikota masyarakat dan wakil walikota. Pendapatan daerah adalah hak yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan dianggap sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh melalui sumber-sumber yang ditetapkan dan diatur oleh hukum.

1. Mencapai tujuan secara maksimal dan tepat atau memilih tujuan yang tepat untuk memperoleh hasil terbaik disebut efektif. Diharapkan, sebagai lembaga teknis yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan daerah, Badan Keuangan Daerah dapat mengumpulkan dana dengan cepat dan sesuai dengan rencana.
2. Efisien berarti mengurangi biaya, tenaga, dan waktu sambil menghasilkan hasil terbaik. Ini menunjukkan bahwa Badan Keuangan Daerah yang diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan tepat, cermat, dan berdaya guna sambil menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang optimal dalam pengelolaan pendapatan daerah.
3. Transparan untuk memastikan semua pihak memahami hak dan kewajibannya, Badan Keuangan Daerah harus menjalankan tugas dan fungsi terutama dengan prinsip transparansi, untuk petugas dan wajib pajak dan retribusi.
4. Akuntabel berarti bahwa kebijakan pelaksanaan, pengelolaan sumber daya, dan keuangan daerah yang

diberikan kepada Badan Keuangan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan formal sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi yang diemban oleh badan tersebut.

Selain visi, sebuah organisasi atau instansi juga perlu merumuskan misi yang jelas untuk mengarahkan kegiatan mereka agar tetap relevan dengan perkembangan dan transformasi waktu. Dengan memiliki misi yang ditetapkan, organisasi atau instansi dapat menentukan semua tindakan, kegiatan, dan upaya yang diperlukan untuk mencapainya. Badan Keuangan Kota Parepare telah menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pendapatan daerah.
2. Membangun sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien untuk menciptakan akuntabilitas keuangan daerah.
3. Meningkatkan pengelolaan aset daerah secara profesional dan akuntabel.
4. Menjaga penatausahaan kantor yang tertib administrasi.
5. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam pendapatan, aset, dan keuangan daerah.

Keuangan di tingkat pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota dikelola oleh Badan Keuangan Daerah. Menyusun, merencanakan, mengelola, dan mengawasi penggunaan anggaran yang berasal dari pendapatan daerah, yang mencakup pajak daerah, retribusi, hibah, dan sumber lain yang sah, merupakan tugas utama dari BKD. Dalam badan keuangan daerah, ada enam bidang yang menangani keuangan kota Parepare, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, menggunakan teknologi digital yang disebut SIPD RI (sebelumnya hanya disebut SIPD). Namun seiring berjalannya waktu, aplikasi SIPD telah diganti menjadi SIPD RI karena kebutuhan pelaporan yang sangat tinggi di bidang akuntansi dan pelaporan, di mana bidang-bidang ini bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan tersebut .

B. Perkembangan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Badan Keuangan Daerah dibentuk dari bagian Sekretariat Daerah Kota (SETDAKO) pada tahun 2017. Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah proses perencanaan yang bertujuan untuk meningkatkan perencanaan jangka panjang. Proses ini dilakukan melalui urutan keputusan yang mempertimbangkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan.

Menyusun perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah langkah

pertama yang perlu diambil untuk memenuhi tuntutan strategi lingkungan lokal, nasional, dan global sambil tetap berada dalam kerangka sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah dapat lebih mudah menyelaraskan visi dan misinya secara berkelanjutan dengan potensi, peluang, dan tantangan yang ada dengan menggunakan pendekatan strategi perencanaan yang jelas dan sinergis. Tujuan dari langkah Ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas lembaga pemerintah. selama lima tahun ke depan , yang mencakup periode 2013–2018 sesuai dengan RPJMD Kepala Daerah. Proses ini akan menghasilkan Rencana Strategis *(Renstra),* yang akan digunakan oleh pemerintah.

Harian Berita Kota Makassar memberikan penghargaan Tokoh Pendorong Kemajuan kepada Walikota Parepare, DR H M Taufan Pawe SH, MH, sebagai salah satu prestasi terbaru Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Pada tanggal 20 September 2017, di Hotel Clarion Makassar, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Agus Arifin Nu'mang, menyerahkan penghargaan. Badan juga memberikan penghargaan kepada Parepare. Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI). Dalam acara Sosialisasi dan Seminar, Dadang Kurnia, Sekretaris Utama BPKP Pusat, memberikan penghargaan kepada Nasarong, Kepala Badan Keuangan Daerah kota Parepare. Audit Internal Sektor Publik

Center *of Excellence* yang diadakan pada Kamis, 3 Mei 2018, di Hotel *Fairmont* Jakarta. Parepare dihargai atas prestasinya dalam pengelolaan keuangan daerah.

C. Struktur Organisasi

Menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, Badan Keuangan Daerah Kota Parepare terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris yang membawahi tiga subbagian:
   a. Administrasi Umum dan Kepegawaian
   b. Perencanaan dan Keuangan
   c. Pelaporan dan Evaluasi
3. Bidang Pendapatan terdiri dari tiga subbidang:
   a. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran,
   b. Subbidang Pemeriksaan, dan
   c. Subbidang Penetapan.
4. Bidang Penagihan terdiri dari tiga subbidang:
   a. Subbidang Pajak dan Retribusi Daerah;
   b. Subbidang Penyelesaian Sengketa; dan
   c. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan.
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari tiga subdivisi:
   a. Subbagian Analisa dan Evaluasi Laporan;
   b. Subbagian Pelaporan Keuangan; dan
   c. Subbagian Penatausahaan Keuangan.

6. Bidang Anggaran terdiri dari tiga Subbidang:
    a. Subbidang Perencanaan Anggaran,
    b. Subbidang Penyusunan Anggaran, dan
    c. Subbidang Administrasi Anggaran.
7. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari tiga Subbidang:
    a. Subbidang Non Gaji,
    b. Subbidang Gaji, dan
    c. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah.
8. Bidang Aset terdiri dari tiga subbidang:
    a. Subbidang Inventarisasi Aset;
    b. Subbidang Perencanaan dan Distribusi; dan
    c. Subbidang Pengawasan dan Penghapusan Aset.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), juga dikenal sebagai Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi ini dibuat agar pengelolaan
10. keuangan daerah yang efisien dan akuntabel.

Gambar 4. 1 struktur organisasi



Tugas utama dan fungsi jabatan yang dipegang oleh Badan Keuangan Daerah Kota Parepare adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

   Merumuskan, mengawasi, mengendalikan, membina, dan mengkoordinasikan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pendataan, penetapan, pelaporan, dan pengumpulan pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya adalah tanggung jawab kepala badan keuangan daerah. Fungsi kepala badan meliputi:

   Membuat kebijakan teknis untuk berbagai topik seperti pajak dan retribusi, pengumpulan, akuntansi, anggaran, perbendaharaan, pendapatan, dan aset daerah;

   a. Membuat rencana program dan anggaran untuk Badan Keuangan Daerah;

b. Mengatur pelaksanaan tugas-tugas;
c. Melakukan pelatihan, pengawasan, dan evaluasi UPTD;
d. Mengelola urusan kesekretariatan Badan Keuangan Daerah; dan
e. Melaksanakan tugas.

2. Sekretaris

Administrasi umum, kepegawaian, surat-menyurat, penyusunan program kegiatan, dan perencanaan dan keuangan adalah tanggung jawab utama sekretaris. Fungsi sekretaris meliputi:

a. Memberikan penjelasan tentang kebijakan teknis untuk administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.
b. Memberikan dukungan untuk administrasi umum, kepegawaian, dan perencanaan, serta pengelolaan keuangan dan aset.
c. Meningkatkan, mengkoordinasikan, dan mengawasi program dan kegiatan di lingkungan Badan Keuangan Daerah.
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

3. Kepala Bidang Pendapatan

Kepala Bidang Pendapatan bertugas mencatat, mendaftarkan, memeriksa, dan menetapkan potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah. Fungsinya meliputi:

a. Membuat kebijakan teknis di bidang pendapatan.
b. Melaksanakan program dan kegiatan terkait pendapatan.
c. Meningkatkan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi program dan kegiatan kepala subbidang di bidang pendapatan.
d. Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan di bidang pendapatan.
e. Melakukan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan

4. Kepala Bidang Penagihan

Kepala Bidang Penagihan bertanggung jawab atas pengumpulan pajak dan retribusi daerah, pembukuan, dan pelaporan. Tugasnya meliputi:

a. Membuat kebijakan teknis penagihan.
b. Melaksanakan program dan kegiatan terkait pengumpulan.
c. Membangun, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengawasi program dan kegiatan kepala subbidang.
d. Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan pengumpulan.
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kepala Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi, pelatihan, pengawasan, dan evaluasi di bidang perencanaan anggaran, perencanaan anggaran, dan administrasi anggaran. Fungsi Kepala Bidang Anggaran meliputi:

a. Menyusun kebijakan teknis terkait anggaran;
b. Menyelenggarakan program dan kegiatan terkait anggaran; dan
c. Membina, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengawasi program dan kegiatan kepala sub

6. Kepala Bidang Perbendaharaan

Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan menyebarkan perencanaan, perencanaan, dan administrasi anggaran adalah tanggung jawab Kepala Bidang Perbendaharaan. Fungsi Kepala Bidang Perbendaharaan meliputi:

a. Menyusun kebijakan teknis terkait anggaran;
b. Menyelenggarakan program dan kegiatan terkait anggaran; dan
c. Membina, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengawasi program serta kegiatan

7. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Tugas merencanakan, mengatur, membangun, mengawasi, dan memberikan laporan keuangan dan penatausahaan yang diberikan kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan bertanggung jawab atas :

a. Mengembangkan kebijakan teknis akuntansi dan pelaporan;
b. Melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan;

c. Membangun, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengawasi program dan kegiatan kepala subbidang akuntansi dan pelaporan;
d. Melakukan evaluasi program dan kegiatan akuntansi dan pelaporan; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

8. Kepala Bidang Aset

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan bertanggung jawab atas laporan keuangan dan penatausahaan . Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan bertanggung jawab atas :

a. Mengembangkan kebijakan teknis akuntansi dan pelaporan;
b. Melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan;
c. Meningkatkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengawasi program dan kegiatan kepala subbidang akuntansi dan pelaporan;
d. Melakukan evaluasi program dan kegiatan akuntansi dan pelaporan.

Melakukan pekerjaan tambahan yang diberikan oleh pimpinan

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Studi yang dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare menemukan data dan informasi tentang penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Hasil wawancara menunjukkan bagaimana Badan Keuangan Daerah Kota Parepare menggunakan teknologi digital dalam operasinya. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur keuangan setiap daerah di Indonesia, termasuk Kota Parepare. Menurut wawancara, pengelolaan keuangan di setiap daerah, khususnya di Badan Keuangan Daerah, dilakukan melalui langkah-langkah yang sistematis perencanaan anggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Permendagri No. 13 Tahun 2006 memastikan bahwa seluruh tahapan ini dilakukan dengan baik dan efisien. Dengan bantuan teknologi digital, pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan lebih jelas, akuntabel, dan efektif.

Empat informan dalam penelitian ini adalah staf akuntansi dan pelaporan di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare diwawancarai. Informasi yang diberikan oleh informan tersebut meliputi proses pengelolaan keuangan daerah, penerapan teknologi digital dalam

pengelolaan, dan prosedur pelaksanaan tahapan pengelolaan keuangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Dengan melakukan wawancara ini, kami dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang metode pengelolaan keuangan yang digunakan oleh badan keuangan daerah Kota Parepare dalam hal efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaporan dan akuntansi keuangan daerah.

Tabel 5. 1 wawancara

No	Narasumber	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bpk h. liyus	Teknologi digital apa yang saat ini digunakan dalam mengelolah keuangan daerah?	Dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya pada bidang akuntansi dan pelaporan saat ini menggunakan SIPD RI yang sebelum hanya dinamakan SIPD
		Apakah ada sistem yang memungkinkan masyarakat dapat mengakses informasi terkait anggaran dan pengeluaran pemerintah?	Ya, jelas ada dan bahkan ketika berbicara tentang akses itu ada pada teknologi yang sudah banyak digunakan di kalangan masyarakat semua itu ada disajikan oleh pemerintah daerah untuk memberikan informasi tentang anggaran pemerintah.
		Sejauh mana teknologi digital ini telah diintegrasikan dalam seluruh proses	Dalam aplikasi SIPD RI itu memuat semua mulai dari perencanaan hingga pelaporan namun aplikasi ini masih terbatas

		pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan hingga pelaporan?	dalam pengaksesan akan tetapi semua bisa dilihat tiap skpd.
		Apakah ada perubahan signifikan dalam hal keterbukaan anggaran dan penggunaan dana publik setelah penerapan teknologi digital?	Ya, banyak perubahan yang bisa membantu dalam penganggaran apalagi kita sebagai yang mengelola keuangan negara itu harus memperhatikan rinciannya nah dari sinilah kita dapat memberikan laporan/informasi terkait anggaran kepada masyarakat
2.	Bpk muchdy	Bagaimana penerapan teknologi digital dalam membantu pengambilan keputusan dan mempertanggung jawabkan sebagai seorang pimpinan?	Sangat membantu dengan adanya teknologi digital ini kita dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi yang terkadang kita secara manual itu bisa saja terjadi kesalahan tapi kalau kita menggunakan aplikasi SIPD RI bisa mengurangi kesalah dan yang terjadi.
		Apakah dalam penggunaan teknologi ini bisa membantu staf/karyawan anda?	Sangat membantu dari segi penjurnalan,kelengkapan-kelengkapan penata akuntansinya karena di aplikasi SIPD RI itu bisa menampilkan buku besar,buku kas umum dll.

		Apakah masyarakat bisa mengakses terkait dengan transparansinya?	Ya Di dalam aplikasi ini ada yang namanya user,admin,pengunjung. Kalo sebagai pengunjung bisa saja digunakan untuk mengakses seperti inspektorat, bpk, dia bisa melihat tampilan outputnya tanpa melihat proses karena itu termasuk data internal kerahasian negara. Namun masyarakat bisa melihat di bagian laporan keuangan tahunan pemerintah daerah namun yang hanya bisa di bisa di akses oleh masyarakat itu adalah hasilnya.
		Bagainama penggunaan teknologi digital dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah ?	Seperti yang saya sampaikan tadi itu bisa meminimalisir kesalahan,kita bisa membanding data satu dengan yang lainnya kita bisa merekonsiliasi data yang lainnya jadi kalo ada beberapa sumber data yang kita jadikan pembanding itu apabila ketemu nilainya itu dikatakan benar. Karena tidak semuanya yang seimbang itu bisa dikatakan benar dalam dan itu bisa diketahui dalam aplikasi SIPD RI.

		Apa kendala staf anda saat menggunakan teknologi ini?	Terkendala pada masalah jaringan yang kurang baik sehingga bisa memberhentikan penginputan, konfirmasi dengan Helpdesk itu bagian tertentu di kementerian dalam negeri yang menangani keluhan dari beberapa daerah disini kita bisa mengajukan beberapa keluhan contohnya ketika kita salah jurnal itu bisa kita sampaikan agar di hapuskan untuk diperbaiki dalam SIPD RI langsung terinput ketika sudah di jurnal maka dari itu harus disampaikan ke helpdesk. Nah dalam pengajuan tidak langsung direspon oleh pihak helpdesk karena banyaknya provinsi dan kabupaten kota yang ditangani.
		Dalam penggunaan teknologi digital ini apakah staf anda bisa semua menggunakan aplikasi ini?	Nah dalam pengaksesan itu semua bisa menggunakan SIPD RI namun ada bagian tertentu contohnya itu bagian pendapatan itu hanya bisa di akses oleh bagian pendapatan dan itu berlaku bagi semua bidang di bkd namun kalau bagian akrab nya itu bisa di akses oleh akuntansi dan pelaporan.

		Sejauh mana teknologi digital telah ini diintegrasikan dalam proses perencanaan hingga pelaporan	Di SIPD RI itu berawal dari perencanaan, penganggaran,penatausahaan,dan aklap dalam proses ini pastinya mulai dari perencanaan untuk dianggarkan dan semua di terinput di aplikasi dan nanti akan di laporkan di bagian akuntansi setelah sudah direalisasikan.
		Perencanaan itu disusun dari mana?	Perencanaan itu harus disinkronkan dengan keinginan nasional sesuai kebutuhan kabupaten/kota dan sesuai dengan APBn/APBd dan semua itu terbaca di aplikasi SIPD RI.
		Apakah semua staf anda paham tentang akuntansi dan bagaimana mereka menyesuaikan ketika ada perubahan kebijakan?	Untuk bidang akuntansi dan pelaporan, sekitar 95% dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi, manajemen, atau ekonomi. Dengan dasar pengetahuan tersebut, para pegawai di bidang ini lebih mudah memahami dan mengimplementasikan standar akuntansi, khususnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Setiap kali ada perubahan aturan atau regulasi, yang sering kali

			diikuti dengan perubahan atau penambahan nomenklatur, Badan Keuangan Daerah secara proaktif mengadakan sosialisasi. Sosialisasi ini ditujukan untuk memastikan bahwa operator dan pengelola akuntansi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
			(SKPD) memahami dan dapat mengadaptasi perubahan tersebut dalam sistem pengelolaan akuntansi daerah. Dengan langkah ini, diharapkan dapat menjaga konsistensi dan akurasi dalam pelaporan keuangan daerah.
		Bagaimana proses pertanggungjawaban seorang pimpinan kepada stafnya dalam mengelola laporan keuangan menggunakan aplikasi?	Sebagai pimpinan, saya merasa bertanggung jawab penuh atas semua yang dilakukan oleh staf dalam menginput data dari setiap SKPD yang ada di Kota Parepare. Hal yang paling penting dalam pengelolaan akuntansi adalah memastikan bahwa pencatatan dilakukan sesuai dengan jumlah yang sebenarnya, tanpa ada

			manipulasi. Akuntansi tidak boleh diakal-akali karena pada akhirnya laporan yang dihasilkan akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang tentu saja akan melihat kewajaran dalam laporan tersebut. Oleh karena itu, kami selalu berpegang pada prinsip kejujuran dan transparansi, serta memastikan semua pencatatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan cara ini, kami dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil, yang pada gilirannya akan menghasilkan keputusan yang tepat dan akurat. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk melindungi. akuntabilitas dan kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan daerah.
		Dampak apa yang dirasakan setelah penerapan teknologi digital dalam meningkatkan akuntabilitas dan	Banyak dampak yang kemudian timbul timbul dari penerapan ini salah satunya itu yang saya katakan bahwa meminimalisir kesalahan dan mencegah terjadinya korupsi dan kita bisa

		transparansi?	mengetahui dimana letak kesalahan itu.
3.	Bpk hamka	Apakah selama menggunakan teknologi digital di pemerintah daerah kota parepare itu dapat meningkatkan transparansi?	Kalo berbicara transparansi ya jelas transparan namun bukan berarti telanjang maksudnya proses pelaporan itu tdk bisa di publish namun untuk hasil itu bisa dilihat di laporan tahunan pemerintah daerah. Bahkan semua skpd yang ada di kota parepare bisa mengakses lewat aplikasi SIPD RI. Laporan keuangan yang kami hasilkan akan diperiksa terlebih dahulu oleh BPK setelah audit selesai laporan pertanggungjawaban tersebut akan kami serahkan dan publikasikan Laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK tersebut akan menjadi dasar untuk peraturan daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.Dengan cara ini, kami memastikan bahwa Seluruh proses pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta dilakukan secara transparan. dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan instansi terkait. Ini juga sebagai upaya kami untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan

			anggaran daerah.
		Bagaimana cara pengindeksan di semua skpd dalam penggunaan teknologi digital?	Ya dari beberapa yang sudah saya coba itu semua skpd itu memang bisa diakses namun ada batasan untuk pengaksesan itu dan disitu terbaca semua LRA di setiap skpd.
		Apakah ada yang bisa diakses oleh masyarakat terkait transparansi?	Ya ada di website di kota parepare disitulah muncul laporan keuangan setiap tahunya.
	Ibu ayu lestari	Apa kendala saat menggunakan teknologi digital ?	Selama saya menggunakan aplikasi sipd itu ada banyak kendala yang kami alami, masih dalam perkembangan karena masih banyak fitur fitur yang belum sepenuhnya belum tersedia dan masih banyak lagi.

B. Pembahasan

Penerapan teknologi digital di kantor badan keuangan daerah kota parepare menunjukkan sejumlah peningkatan signifikan dalam pengelolaan keuangan. Salah satu temuan utama adalah kemampuan teknologi digital untuk mengintegrasikan data keuangan dengan lebih cepat dan akurat. Penggunaan sistem informasi keuangan daerah berbasis digital memungkinkan proses pencatatan, pengolahan, dan

pelaporan keuangan dilakukan secara lebih efisien dibandingkan metode konvensional. Integrasi data yang baik ini membantu dalam mempercepat proses audit dan memastikan bahwa laporan keuangan tersedia tepat waktu dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, laporan keuangan pemerintah kota parepare meningkatkan transparansi dan membuatnya lebih mudah diakses oleh publik. Teknologi digital memungkinkan pembuatan laporan keuangan yang lebih jelas, terstruktur, dan mudah diakses, baik oleh pemangku kepentingan internal maupun masyarakat umum sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap seluruh hasil kinerja dalam mengelolah keuangan daerah.

Penelitian mengenai penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan peralihannya ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah-Republik Indonesia (SIPD-RI). Menunjukkan beberapa kesenjangan yang perlu mendapat perhatian. SIPD awalnya dikembangkan untuk mendukung pengelolaan data dan informasi di tingkat pemerintah daerah dengan fokus pada pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data. Sistem ini membantu dalam perencanaan dan pengawasan program pembangunan, namun sering terkendala oleh proses manual dan integrasi data yang kurang efisien. Sebaliknya, SIPD-RI dirancang dengan teknologi yang lebih canggih, memungkinkan integrasi data lintas sektor dan wilayah secara real-time. Hal ini memungkinkan data diperbarui dan diakses instan oleh

berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. SIPD-RI juga menambahkan fitur-fitur baru yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, seperti dashboard analitik komprehensif untuk pemantauan kinerja secara langsung. Namun, dalam implementasinya, peneliti menemukan beberapa masalah yang menghambat pelaksanaan SIPD dan SIPD-RI. Beberapa di antaranya adalah jaringan server yang tidak mendukung pelayanan, proses penginputan data yang sering mengalami keterlambatan karena kendala jaringan, serta penginputan data yang masih dilakukan secara manual, mengurangi efektivitas dan efisiensi sistem. Masalah ini dapat berdampak negatif pada kinerja pemerintah daerah karena penggunaan sistem yang belum optimal menghambat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. SIPD dan SIPD-RI berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan fitur pemantauan dan pelaporan real-time, analisis kinerja, serta transparansi dan akuntabilitas. SIPD memungkinkan pemerintah daerah melakukan pemantauan keuangan daerah secara real-time, menyajikan data keuangan yang akurat dan tepat waktu, dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, SIPD memungkinkan evaluasi anggaran dengan membandingkan realisasi anggaran dengan target yang ditetapkan dan mengidentifikasi potensi penyimpangan. Sistem ini juga membantu menilai efisiensi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan transparansi

informasi keuangan dengan menyediakan akses mudah bagi masyarakat untuk memahami dan mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Untuk perencanaan dan pengambilan keputusan, SIPD membantu dalam perencanaan anggaran dengan menyediakan informasi historis dan tren keuangan yang relevan, serta memfasilitasi pengambilan keputusan strategis terkait kebijakan keuangan dan alokasi sumber daya. SIPD juga berperan dalam pengelolaan risiko dengan membantu identifikasi potensi risiko keuangan dan pengembangan strategi pengelolaannya. Meskipun SIPD-RI menawarkan banyak keunggulan, kesenjangan dalam pelaksanaannya menunjukkan perlunya peningkatan infrastruktur teknologi dan pelatihan bagi pengguna untuk memastikan sistem ini dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi tata kelola pemerintahan daerah.

Untuk mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah menggunakan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) dan harus selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pada kenyataannya, banyaknya sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah membuat sulit bagi pihak-pihak terkait untuk mendapatkan data yang menggabungkan keuangan antara daerah dan pusat. Dari 524 pemerintah daerah, sebanyak 361, atau 68,89 persen, telah menerapkan sistem informasi keuangan. Namun, 163 dari mereka, atau 31,11 persen, masih tidak

jelas atau tidak tahu tentang sistem yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah mereka. Hal ini menciptakan tantangan dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, karena kesulitan dalam mengintegrasikan data dan informasi keuangan dari berbagai daerah untuk analisis yang lebih komprehensif. Namum di pemerintah kota parepare itu sendiri sudah menggunakan SIPD RI sebagai alat untuk melaporkan seluruh belanja yang ada di kota parepare di setia SKPD. Data per Oktober 2012 menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Indonesia masih jauh dari seragam.

Terdapat perbedaan dalam penggunaan sistem informasi di setiap pemerintah daerah (pemda). Sebanyak 223 pemerintah daerah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), 68 menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), dan 123 menggunakan sistem yang belum terstandarisasi. Terlebih lagi, 110 pemda mengabaikan sistem informasi sama sekali dalam pengelolaan keuangannya namun menurut PERDA-NO.3-THN-2023 menyatakan bahwa jumlah skpd yang ada di kota parepare berjumlah 34 skpd dan semua sudah menggunakan aplikasi SIPD RI Hal ini diungkapkan oleh Bapak H. Liyus, staf Badan Keuangan Daerah bidang akuntansi dan pelaporan, yang menekankan pentingnya konsistensi dalam penerapan sistem informasi yang memadai di seluruh daerah. Ketidakteraturan dalam penggunaan

sistem ini tentu saja dapat menghambat efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta kesulitan untuk mengintegrasikan data keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

"Mungkin karena setiap daerah menerapkan peraturan yang berbeda, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang ada saat ini sangat berbeda. *Ketika setiap daerah mengikuti peraturan yang berbeda sebagai acuan, maka sistem yang dikembangkan dan diterapkan juga cenderung berbeda-beda, dan ini berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perbedaan dalam sistem ini mengarah pada kesulitan dalam integrasi data, transparansi, dan akuntabilitas, karena tidak ada keseragaman atau standarisasi yang dapat memastikan bahwa informasi keuangan antar daerah dapat saling terhubung atau dianalisis secara komprehensif. Dengan adanya peraturan yang seragam dan sistem yang terintegrasi, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Oleh bpk H. Liyus"*

Dari hasil penjelasan penyampaian diatas bisa disimpulkan bahwa Sistem informasi keuangan daerah menggunakan sejumlah sistem yang berbeda yang digunakan oleh setiap pemerintah daerah di Indonesia. Sehingga itu yang menjadikan tidak selaras dan adanya peraturan yang berubah ubah dan disitu kita harus sesuaikan dengan kebutuhan pemerintah dalam menyusun laporan keuangan. Namun dengan berjalannya waktu dan semua sudah disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah pemerintah kota parepare mengikuti peraturan yang mewajibkan setiap daerah menggunakan teknologi digital. Berikut ini teknologi digital atau aplikasi yang digunakan oleh badan keuangan daerah kota parepare.

“Dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya pada bidang akuntansi dan pelaporan saat ini menggunakan SIPD RI yang sebelum hanya dinamakan SIPD oleh H. Liyus”.

Menurut temuan wawancara sebelumnya, Badan Keuangan Daerah Kota Parepare telah menggunakan teknologi digital yang dikenal sebagai SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) sejak dahulu. Namun, pada periode tersebut, mereka beralih ke aplikasi SIPD RI perubahan peraturan ini dianggap perlu untuk mengadopsi sistem yang lebih kompleks, yang tidak hanya mencakup informasi terkait keuangan daerah, tetapi juga informasi tentang pembangunan daerah dan aspek pemerintah regional lainnya. Tujuannya adalah untuk menggabungkan semua komponen ini ke dalam satu sistem yang dirancang secara menyeluruh dan terorganisir. Dengan adanya sistem yang lebih holistik dan terhubung, diharapkan proses pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah dapat lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam konteks pembangunan daerah secara keseluruhan. Integrasi ini juga akan mempermudah koordinasi antara pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya, sekaligus meningkatkan akuntabilitas kepada publik. dari alasan inilah mengapa sipd di ganti menjadi SIPD RI. Berikut ini bentuk aplikasi SIPD RI yang digunakan badan keuangan daerah kota parepare.

Gambar 5. 1 aplikasi SIPS RI





Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) RI dirancang untuk fokus pada proses bisnis yang mencakup pembangunan daerah, keuangan, dan informasi lainnya terkait pemerintahan daerah. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk memastikan bahwa lembaga terkait dapat mengakses dan menggunakan data dan informasi yang berkaitan dengan pembangunan, keuangan, dan pemerintahan daerah sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Dengan SIPD,

diharapkan akan tercipta integrasi data yang lebih baik antar instansi pemerintah, yang memungkinkan kolaborasi yang lebih efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pembangunan daerah. Selain itu, penggunaan aplikasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam. pengelolaan pemerintahan daerah. Sejak digunakannya aplikasi ini maka badan keuangan daerah kota parepare lebih mudah dalam melaporkan segala bentuk penggunaan anggaran mulai dari perencanaan hingga pelaporan maka dari sinilah terbentuk laporan keuangan yang berkualitas dan transparan berikut ini bentuk jawaban terkait pengaksesan laporan keuangan.

"Ya, jelas ada dan bahkan kalau berbicara tentang akses itu ada pada teknologi yang sudah banyak digunakan di kalangan masyarakat semua itu ada disajikan oleh pemerintah daerah untuk memberikan informasi tentang anggaran pemerintah oleh H. Liyus."

Dari jawaban di atas menyatakan bahwa akses dari pemeriksaan laporan keuangan itu bisa diakses melalui platform sosial media yang sudah tersedia dan disitu semua sudah tersaji bahkan setiap 1 tahun itu wajib di publikasi ke masyarakat luas guna masyarakat bisa menilai kinerja pemerintah kota parepare itu seperti apa namun tantangannya adalah tidak sedikit banyaknya masyarakat tidak paham terkait itu walaupun kita sudah sajikan secara transparan tapi itulah adalah sebuah bentuk

pertanggungjawaban yang wajib disampaikan. Namun bagaimana dengan teknologi digital ini mengintegrasikan seluruh proses perencanaan hingga pelaporan.

“Dalam aplikasi SIPKD RI itu memuat semua mulai dari perencanaan hingga pelaporan namun aplikasi ini masih terbatas dalam pengaksesan akan tetapi semua bisa dilihat tiap skpd.”

Dalam aplikasi SIPD RI itu sudah di pertimbangkan bahwa mulai dari data dan informasi terkait perencanaan, keuangan, dan pelaporan daerah Perencanaan pembangunan daerah, Penganggaran, Pelaksanaan, Pelaporan keuangan, Profil pembangunan daerah semua itu tertuang dalam aplikasi SIPD RI dimana aplikasi ini di dapat mempermudah dalam penginputan. Dari penggunaan aplikasi ini apakah ada perubahan signifikan yang bisa membantu para staf badan keuangan daerah kota parepare demi menghasilkan laporan keuangan yang betul -betul sesuai dengan penganggaran setelah diterapkannya aplikasi SIPD HARI ini.

“Ya, banyak perubahan yang bisa membantu dalam penganggaran apalagi kita sebagai yang mengelola keuangan negara itu harus memperhatikan rinciannya nah dari sinilah kita dapat memberikan laporan/informasi terkait anggaran kepada masyarakat oleh bpk H. Liyus”

Dari ungkapan di atas mengatakan bahwa banyak perubahan yang terjadi setelah menggunakan teknologi digital khususnya dalam menyusun anggaran pemerintah daerah banyak

perubahan yang dapat memberikan dampak positif dalam pengelolaan anggaran, terutama bagi kami yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara. Sebagai pengelola keuangan negara, harus sangat teliti dalam memperhatikan setiap rincian anggaran. Dengan memperhatikan rincian tersebut, kami dapat memberikan laporan atau informasi yang jelas dan akurat mengenai anggaran kepada masyarakat. Ini penting untuk menjamin bahwa pengelolaan keuangan negara transparan dan akuntabel. Namun bagaimana dengan penerapan teknologi digital dalam membantu pengambilan keputusan dan mempertanggung jawabkan sebagai seorang pimpinan.

"Sangat membantu dengan adanya teknologi digital ini kita dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi yang terkadang kita secara manual itu bisa saja terjadi kesalahan tapi kalau kita menggunakan aplikasi oleh bpk Muchdy selaku pimpinan bkd bidang akuntansi dan pelaporan."

Dengan adanya teknologi digital sangat membantu dalam meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses pengelolaan anggaran ketika kita mengandalkan metode manual, kesalahan bisa saja terjadi karena keterbatasan dalam memproses data dengan cepat dan akurat. Namun dengan menggunakan aplikasi SIPD RI atau sistem berbasis digital, kesalahan tersebut dapat diminimalisir. Teknologi digital memungkinkan kita untuk bekerja dengan lebih efisien, memastikan keakuratan data, dan mempercepat proses pengelolaan anggaran. Hal ini tentu

memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Setelah menggunakan aplikasi SIPD RI ini apakah staf yang ada di badan keuangan daerah khususnya di bidang akuntansi dan pelaporan terbantu dengan adanya aplikasi ini

“Sangat membantu dari segi penjurnalan,kelengkapan-kelengkapan penata akuntansinya karena di aplikasi SIPD RI itu bisa menampilkan buku besar,buku kas umum dll oleh bpk Muchdy.”

Teknologi digital sangat membantu semua staf badan keuangan daerah khususnya pada bidang akuntansi dan pelaporan dalam proses penjurnalan dan kelengkapan penata akuntansi, terutama dengan adanya aplikasi SIPD RI. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur yang memudahkan pengelolaan keuangan, seperti menampilkan buku besar, buku kas umum, dan berbagai laporan akuntansi lainnya. Dengan adanya aplikasi ini, proses pencatatan transaksi menjadi lebih terorganisir dan akurat, serta meminimalisir kemungkinan kesalahan dalam pencatatan manual. Hal ini tentu sangat bermanfaat dalam memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Ini pasti akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi karena teknologi digital yang sangat membantu dalam penyusunan laporan keuangan dan bisa dijadikan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada publik khususnya masyarakat yang bisa mengakses dan melihat bentuk pertanggungjawaban itu.

"*Ya Di dalam aplikasi ini ada yang namanya user,admin,pengunjung. kalo sebagai pengunjung bisa saja digunakan untuk mengakses seperti inspektorat, dia bisa melihat tampilan outputnya tanpa melihat proses karena itu termasuk data internal kerahasian negara. Namun masyarakat bisa melihat di bagian laporan keuangan tahunan pemerintah daerah namun yang hanya bisa di bisa di akses oleh masyarakat itu adalah hasilnya oleh bpk Muchdy."*

Di dalam aplikasi ini terdapat beberapa jenis akses pengguna, yaitu user, admin, dan pengunjung. Sebagai pengunjung, pengguna seperti inspektorat atau BPK dapat mengakses tampilan output yang disediakan oleh aplikasi tanpa dapat melihat proses internal di baliknya, karena itu termasuk data yang bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh pihak tertentu yang berwenang. Meskipun demikian, masyarakat tetap dapat mengakses laporan keuangan tahunan pemerintah daerah, namun hanya sebatas hasil akhirnya. Hal ini memastikan bahwa informasi yang dapat diakses oleh publik tetap transparan, sementara data sensitif yang terkait dengan proses pengelolaan keuangan tetap terlindungi namun dari hal tidak semua diperlihatkan kepada publik transparan bukan berarti telanjang maka dari itu perlu terlebih dahulu diperiksa oleh pihak yang berwenang perlu di audit dan diperiksa oleh BPK atau badan pemeriksa keuangan. Dari hasil itu tentu ada pertanggungjawaban guna meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah pemerintah kota parepare.

"Seperti yang saya sampaikan tadi itu bisa meminimalisir kesalahan,kita bisa membanding data satu dengan yang lainnya kita bisa merekonsiliasi data yang lainnya jadi kalo ada beberapa

sumber data yang kita jadikan pembanding itu apabila ketemu nilainya itu dikatakan benar. Karena tidak semuanya yang seimbang itu bisa dikatakan benar dalam dan itu bisa diketahui dalam aplikasi SIPD RI oleh bpk Muchdy."

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, penggunaan aplikasi ini sangat membantu dalam meminimalisir kesalahan. Kita bisa membandingkan data satu dengan yang lainnya dan melakukan rekonsiliasi antara data tersebut. Jika terdapat beberapa sumber data yang digunakan sebagai pembanding, dan hasilnya menunjukkan nilai yang sama, maka data tersebut dapat dianggap benar. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua data yang seimbang atau cocok dapat langsung dikatakan benar. Proses verifikasi dan rekonsiliasi ini sangat penting untuk memastikan keakuratan data, dan aplikasi SIPD RI memfasilitasi hal tersebut dengan baik, sehingga kesalahan dalam pengelolaan data keuangan dapat lebih mudah terdeteksi dari sinilah bentuk pertanggungjawaban selaku pimpinan yang mengawasi seluruh kegiatan yang ada mulai dari perencanaan hingga pelaporan itu tentu harus di bawah pengawasan seorang pimpinan dan segala bentuk keputusan itu harus bisa melahirkan solusi yang tepat yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan dengan cara apa seorang pimpinan bisa memastikan bahwa semua staf ada itu bisa menggunakan aplikasi SIPD RI.

"*Nah dalam pengaksesan itu semua bisa menggunakan SIPD RI namun ada bagian tertentu contohnya itu bagian pendapatan itu*

*hanya bisa di akses oleh bagian pendapatan dan itu berlaku bagi semua bidang di bkd namun kalau bagian akrab nya itu bisa di akses oleh akuntansi dan pelaporan oleh bpk Muchdy**.”***

Dalam pengaksesan data, seluruh informasi dapat diakses melalui aplikasi SIPD RI, namun terdapat pembatasan akses berdasarkan bagian atau bidang tertentu. Sebagai contoh, bagian pendapatan hanya dapat diakses oleh pihak yang bertanggung jawab dalam bagian pendapatan, dan aturan serupa berlaku untuk setiap bidang di Badan Keuangan Daerah. Sementara itu, data terkait akuntansi dan pelaporan hanya bisa diakses oleh pihak yang menangani akuntansi dan pelaporan. Pembatasan akses ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data, serta memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang memiliki otoritas untuk mengelola dan mengakses data sesuai dengan tanggung jawab mereka masing-masing. Sebagai seorang pimpinan bagaimana jika ada beberapa tidak terkait akuntansi bahkan terkait teknologi itu sendiri sedangkan yang digunakan di era ini itu teknologi bagaimana menyikapi hal tersebut.

“Sekitar 95% dari sumber daya manusia di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare bekerja di bidang akuntansi dan pelaporan., manajemen, atau ekonomi. Dengan dasar pengetahuan tersebut, para pegawai di bidang ini lebih mudah memahami dan mengimplementasikan standar akuntansi, khususnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Setiap kali ada perubahan aturan atau regulasi, yang sering kali diikuti dengan perubahan atau penambahan nomenklatur, Badan Keuangan Daerah secara proaktif mengadakan sosialisasi. Sosialisasi ini ditujukan untuk memastikan bahwa operator dan pengelola akuntansi di setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) memahami dan dapat mengadaptasi perubahan tersebut dalam sistem pengelolaan

akuntansi daerah. Dengan langkah ini, diharapkan dapat menjaga konsistensi dan akurasi dalam pelaporan keuangan daerah.

95% SDM yang terlibat di bidang akuntansi dan pelaporan memiliki gelar akuntansi, manajemen, atau ekonomi. Dengan pendidikan yang relevan, para staf ini lebih mudah memahami penerapan akuntansi, khususnya dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kemampuan mereka dalam memahami prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku sangat membantu dalam memastikan bahwa setiap proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dapat dilakukan dengan tepat, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Setiap kali ada perubahan aturan atau penambahan nomenklatur, kami selalu melakukan sosialisasi kepada operator dan pengelola akuntansi di setiap SKPD. Sosialisasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap perubahan dapat dipahami dan diterapkan dengan tepat oleh semua pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Diharapkan pemerintah daerah dapat memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dengan transparan, akuntabel, dan efisien. Dari ke 6 bagian yang ada dalam standar laporan keuangan pemerintah wajib diketahui semua staf yang berada di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.

semua wajib dilaporkan setiap skpd. Dari laporan keuangan yang dihasilkan perlu adanya laporan pertanggungjawaban dari pemerintah daerah terkait transparansi.

“Kalo berbicara transparansi ya jelas transparan namun bukan berarti telanjang maksudnya proses pelaporan itu tdk bisa di publish namun untuk hasil itu bisa dilihat di laporan tahunan pemerintah daerah. Bahkan semua skpd yang ada di kota parepare bisa mengakses lewat aplikasi SIPD RI. Dengan cara ini, kami memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, transparan, dan dapat diakses, dan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK akan menjadi dasar untuk peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dipertanggungjawabkan kepada publik dan instansi terkait. Ini juga sebagai upaya kami untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran daerah. oleh bpk Hamka.”

Ketika berbicara tentang transparansi, tentu kami mengutamakan keterbukaan, namun bukan berarti semua proses pelaporan bisa dipublikasikan secara terbuka. Proses pelaporan itu sendiri tidak bisa langsung dipublikasikan, tetapi hasil akhirnya dapat dilihat dalam laporan tahunan pemerintah daerah. Bahkan, semua SKPD yang ada di Kota Parepare bisa mengakses laporan keuangan tersebut melalui aplikasi SIPD RI. Lebih dulu, laporan keuangan yang dibuat oleh Badan Keuangan Daerah akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan keuangan tersebut selanjutnya akan dikirim kepada pihak setelah BPK menyelesaikan audit. yang berwenang dan dipublikasikan kepada masyarakat. Laporan keuangan yang telah

diaudit tersebut menjadi bagian penting dari peraturan daerah pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Hal ini memastikan bahwa laporan yang dipublikasikan sudah melalui proses audit yang sah dan transparan berikut ini penjelasan yang dapat menjelaskan mengapa transparansi keuangan lembaga publik sangat penting, dan ini adalah tujuan dari adopsi teknologi digital.

Pertama, transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Pemerintah yang tidak memberi tahu masyarakat tentang informasi keuangan mereka akan kurang percaya jika dibandingkan dengan pemerintah yang tertutup. Ini karena pemerintah yang menyembunyikan informasi keuangan mungkin melakukan penyelewengan atau kurang kompeten dalam mengelola dan melaporkan keuangan. Hal ini tentu dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah, terutama dalam hal aspek pembangunan yang mungkin dianggap tidak berhasil atau buruk.

Kedua, transparansi juga bertujuan untuk meningkatkan pengawasan masyarakat. Masyarakat berperan penting dalam mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di tingkat lapangan, terutama ketika perangkat pemerintah tidak ada di sana. Dengan diberikan informasi keuangan yang cukup, masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan dan memberikan

masukan atau melaporkan kekurangan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Dukungan dari masyarakat sangat diperlukan agar pemerintah dapat meningkatkan kinerja pembangunan yang lebih efisien.

Ketiga, Sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk pembangunan diri dan lingkungan sosial mereka. Dalam konteks ini, hak masyarakat untuk mengetahui kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah, termasuk alokasi anggaran, adalah bagian dari hak mereka untuk mendapatkan informasi yang memengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa informasi keuangan disampaikan secara terbuka kepada publik, demi terciptanya akuntabilitas dan kualitas demokrasi yang lebih baik. transparan sehingga warga dapat menilai kecukupan atau kekurangan pembiayaan program dan kebijakan. Namun ada beberapa kendala yang dirasakan selama menggunakan aplikasi SIPD RI. Dari hasil wawancara saya ada beberapa kendala yang ternyata dirasa para pengguna aplikasi speed RI khususnya pada pemerintah kota parepare sebagai berikut:

1. *Terkait aplikasi sipd RI tahun 2024, aplikasi masih dalam proses pengembangan sehingga masih terdapat fitur-fitur yang belum sepenuhnya tersedia.*
2. *Proses login untuk mengakses link aplikasi sipd RI, skpd sering mengalami white screen tampilkan aplikasi sehingga sulit untuk*

melakukan login di aplikasi sipd RI.

3. *Aplikasi sipd RI sering mengalami proses maintenance yang mengakibatkan skpd kesulitan dalam melakukan proses penginputan.*
4. *Aplikasi sipd RI penatausahaan mengeluarkan fitur panjar belum dapat digunakan dikarenakan belum terintegrasinya TBP(Tanda bukti pembayaran) yang telah dibuat dengan NPD(Nota pencairan dana) panjar yang menyebabkan data tidak tertera pada daftar panjar pada skpd.*
5. *Fitur-fitur menu cetak aplikasi sipd RI skpd pada BKU(buku kas pembantu), buku panjar/non panjar spj fungsional, rincian objek laporan dan penutupan kas,nilai pada laporan yang maksimal oleh ibu ayu lestari*

Dari beberapa kendala di atas di sampai oleh salah satu monitoring badan keuangan daerah kota parepare namun kendala itu sudah di tindak lanjuti oleh pimpinan bkd dia menyebutkan beberapa bulan kemarin sudah melakukan perjalan dinas ke jakarta untuk menyampaikan keluhan seluruh skpd yang ada kota parepare dan pernyataan itu disampaikan langsung oleh pimpinan bidang akuntansi dan pelaporan dia menyampaikan bahwa keluhan itu sudah sampai pada helpdesk yang merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap itu dan itu sudah disampaikan dan dia berharap ada tindak lanjut terkait kendala itu karena itu salah satu penghambat dalam menginput di setiap skpd.

Badan Keuangan Daerah Parepare menggunakan aplikasi yang dirancang untuk merekonsiliasi seluruh pendapatan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penggunaan aplikasi ini sangat mendukung proses penyusunan laporan keuangan yang lebih

efisien dan akurat. Selain itu, aplikasi tersebut juga mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sehingga dapat menjamin bahwa laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya aplikasi yang mampu mengintegrasikan seluruh data keuangan dari berbagai SKPD, proses rekonsiliasi menjadi lebih mudah dan terorganisir.

Hal ini juga memudahkan pemeriksaan dan evaluasi oleh pihak terkait, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang nantinya akan memverifikasi kebenaran dan kewajaran laporan keuangan tersebut. Selain itu, penggunaan aplikasi berbasis SAP menjamin bahwa laporan keuangan dibuat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di pemerintah daerah, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan akurasi dalam pengelolaan keuangan. Penetapan sebagai layanan publik, Sistem Informasi Pembangunan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) diharapkan dapat membawa dampak positif dalam peningkatan kinerja, akuntabilitas, dan transparansi pemerintah. Keberadaan aplikasi ini akan mendukung pemerintah daerah dalam mengelola dan menyajikan data dengan cara yang lebih terintegrasi dan efisien.

Dengan adanya sistem yang seragam dan terstandarisasi, proses pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah dapat lebih mudah dipantau, diawasi, dan dievaluasi oleh pihak-pihak yang terlibat, termasuk masyarakat dan lembaga pengawas seperti

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lebih jauh lagi, penerapan SIPD RI diharapkan dapat berkontribusi terhadap tercapainya program nasional, khususnya dalam upaya pencegahan korupsi. Dengan sistem yang lebih transparan, setiap aliran anggaran dan penggunaan dana publik akan lebih mudah dilacak dan diawasi, mengurangi peluang terjadinya penyimpangan atau penyelewengan. Ini tentunya akan memperkuat strategi nasional dalam memberantas korupsi dan meningkatkan integritas serta kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dari hasil wawancara tentang akuntabilitas dan transparansi pihak badan keuangan daerah pada bidang akuntansi dan pelaporan menyatakan bahwa kami bertanggung jawab penuh dengan apa yang kami sampaikan dan laporkan dalam penggunaan aplikasi spid RI dengan adanya aplikasi ini sangat membantu kami dalam penginputan terkait anggaran yang digunakan setiap skpd karena kami hanya melihat melalui aplikasi saja tanpa harus turun langsung ke lapangan dari aplikasi ini juga kami harap bisa meminimalisir terjadinya kesalahan dan bahkan menyalahgunakan anggaran di pemerintah kota parepare. Selaku pimpinan bidang akuntansi dan pelaporan saya sangat bertanggung jawab dengan seluruh staf saya yang telah menggunakan aplikasi ini karena khusus pada bidang akuntansi itu harus paham terkait aplikasi ini dan itu kami selalu memberikan

arahan guna bisa menyajikan laporan keuangan yang berkualitas yang berbasis teknologi digital.

Terkait transparansi kami paham betul bahwa kami mengelola uang masyarakat maka dari itu kami selaku orang yang tau mulai dari proses perencanaan hingga pelaporan harus bertanggung jawab penuh dengan penyajian laporan keuangan karena kita sudah diberi wadah dalam bentuk aplikasi sipd RI untuk mempermudah dalam proses penginputan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses pelaporan dan tidak terjadi sebuah kesalahan dan kami sudah menyediakan akses untuk masyarakat dalam melihat kinerja kami di setiap tahunnya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil diskusi dan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital di Kantor Badan Keuangan Daerah pemerintah Kota Parepare telah memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Sistem informasi keuangan berbasis digital mampu mempercepat integrasi data keuangan, meningkatkan aksesibilitas laporan, serta memungkinkan pelacakan alur dana secara real-time. Teknologi ini juga memberikan pengawasan internal yang lebih kuat, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas keuangan. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan teknis dan sumber daya manusia yang perlu diatasi agar penerapan teknologi digital di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dapat memberikan hasil yang lebih optimal. berjalan dengan lebih efektif, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur teknologi yang mendukung sistem keuangan digital. Penerapan teknologi digital pada badan keuangan daerah di pemerintah kota parepare sangat berpengaruh besar dalam proses perencanaan hingga pelaporan.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan diskusi penelitian ini, beberapa saran yang dapat dilakukan di masa depan untuk mendukung penggunaan teknologi digital untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah **.**

1. Diharap penelitian ini dapat menyoroti pentingnya pelatihan bagi staf di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare menggunakan teknologi digital. Pemahaman yang memadai tentang sistem dan aplikasi digital akan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola dan melaporkan keuangan daerah dengan cara yang akurat dan transparan.
2. Diharap untuk peneliti selanjutnya untuk melakukan pengkajian yang lebih mendalam tentang aplikasi SIPD RI dengan adanya teknologi yang mendukung di era baru yang ada di Kota Parepare, sehingga perencanaan itu bisa terealisasi sampai ke pelaporan supaya Kota Parepare dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, A. (2022). *Analisis dan perancangan sistem informasi pelaporan keuangan badan usaha milik desa berbasis desktop*. *1*(1), 6–13.

Albugis Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado, F. F. (2016). Implementation of Regional Financial Accounting System Achieve Transparanency and Accountability in Local Goverrntment Finance North Sulawesi Province. *Penerapan Sistem Akuntansi… Jurnal EMBA*, *78*(3), 78–089.

Andi Kusnadi, Fahmi Oemar, & Bambang Supeno. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Sains Akuntansi Dan Keuangan*, *1*(1), 51–63. https://doi.org/10.55356/sak.v1i1.10

Aprilla, W., Wulandari, M., Elcaputera, A., Hukum, F., & Bengkulu, U. (2024). *Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi kebijakan dan tindakan pemerintah , sementara akuntabilitas memastikan bahwa pejabat publik*. *2*(4).

Budiriyanto, E. (2013). Kajian Legal Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). *Kementrian Republik Indonesia*. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01/Kajian_Legal_SIKD_Ekobudi_Versi2.pdf

Failany, M. A., & Fahriani, D. (2024). *Praktek Kerja Lapang Akuntansi Penerapan Teknologi Digital dalam Mendukung Transparansi Keuangan Pemerintah*. *1*(1), 1–6.

Flypaper Effect. (2013). *The New Palgrave Dictionary of Economics, 2012 Version*. https://doi.org/10.1057/9781137336583.0632

Kurniawati, P. (2017). Hasil dan pembahasan. *Universitas Nusantara PGRI Kediri*, *01*, 1–7.

Kushartiningsih, R., & Riharjo, I. B. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* , *10*(3), 1–18.

Muhammad, D. (2019). Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital. *Infokam*, *15*(2), 116–123.

MuhammadAfif Failany1, D. F. (2024). *Penerapan Teknologi Digital dalam Mendukung Transparansi Keuangan Pemerintah*. *21*(1), 1–14.

Munawar, Z., Herdiana, Y., Suharya, Y., & Indah Putri, N. (2021). Pemanfaatan Teknologi Digital Di Masa Pandemi Covid-19. *Tematik*,

8(2), 160–175. https://doi.org/10.38204/tematik.v8i2.689

Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, *3*(2), 92–107. https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283

Nugroho, M. A., Kusumawati, F. D., & Buchori, W. P. M. (2024). Peran Digitalisasi Akuntansi Dalam Efisiensi Dan Transparan. *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, *4*(1), 32–43.

Oki, K. K., Nalle, F. W., & Meomanu, P. A. V. (2020). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *5*(2), 1–6. http://jurnal.unimor.ac.id/JEP

Perda Persampahan No. 2/2017, P. (2017). *Pemerintah kabupaten mamuju*. *17*, 1–18.

Sugiharti, C. A., & Hariani, S. (2021). Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, *6*(1), 11–18. https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i1.315

Syachbrani, W., Akuntansi, J. I., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Makassar, U. N. (2024). Peran Teknologi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Bijac: Bata Ilyas Journal of Accounting*, *5*(1), 11–018.

Vidyasari, F. N., & Suryono, B. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *10*(4), 1–24.

Yanti, N. S., Made, A., & Setiyowati, S. W. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, *8*(1), 1–8. https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4455

_____Peraturan daerah nomor 10 tahun 2016. Parepare.

_____Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006.

_____Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

https://keuda.kemendagri.go.id/sipkd#:~:text=Lebih%20jauh%2C%20pada%20Surat%20Edaran,regional%20di%20Provinsi%20Sulawesi%20Selatan.

Dewi Mantasari, Arfianty, A., & Fatimah, F. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Dana Desa Di Kec. Suppa Kab. Pinrang. *DECISION : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *4*(1), 106–114. https://doi.org/10.31850/decision.v4i1.2133

Rappang, D. (n.d.). *ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PRODUK Product Accounting Information System Analysisat Pt . Pertani (Persero)*. *1*(November 2021), 64–72.

The, I., Accountability, F., Rosoan, O., & Regency, E. (2024). *DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KEUANGANDESA ROSOAN KABUPATEN . ENREKANG Analysis Of The Implementation Of The Village Financial System (Siskeudes) In*. *4*(November), 436–447.

https://djpk.kemenkeu.go.id/wp content/uploads/2016/01/Kajian_Legal_SIKD_Ekobudi_Versi2.pdf